



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD ISA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **141123**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.108.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m²/21 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 453.000.000
2. Tanah Seluas 597 m² di KAB / KOTA SEKADAU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m²/70 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/78 m² di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/54 m² di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 14.400 m²/65 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 230 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 231 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
9. Tanah Seluas 232 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **311.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N28LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOBIL, TOYOTA NEW RUSH MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	27.788.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	278.518.444
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.725.306.444
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.725.306.444

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.